

---

## STRATEGI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PANTAI KOTA CIREBON DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Wiyoga Triharto

Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur

[wiyoga.trihartio@unindra.ac.id](mailto:wiyoga.trihartio@unindra.ac.id)

**Abstract :** *The City Beach area in Cirebon City shows a fairly rapid growth and development at this time. This is indicated by the increasing development in the coastal areas of the city in the Kejaksan sub-district and hunchback. However, increasing development has resulted in a decrease in the quality of the environment on the coast of the city itself and to the standard of living of the surrounding communities so that sustainability is threatened. This study aims to draw up the direction of the strategy of spatial use in the coastal area of Cirebon City in sustainable development. The analysis carried out was analyzing the condition of the existing coastal city area, spatial, social and economic policies, and analyzing with dynamic SWOT to obtain a spatial utilization strategy. The results of the SWOT study in urban coastal area utilization show 4 directions of policy strategies: first empower coastal communities to develop space use by optimizing productive natural resources, secondly developing the utilization of economic sectors that are along the coast, thirdly increasing the quantity and quality of infrastructure in supporting coastal city natural resource management activities and creating a clean, healthy and comfortable residential environment, all four make regional regulations on zoning-based coastal area management as mandated by Law No.1 of 2014 with integrated management, as well as strict law enforcement in accordance with applicable regulations by referring to the RTRW.*

**Key Words:** *Strategy, Area Utilization, City Beach*

**Abstrak :** Kawasan Pantai Kota di Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan di kawasan pantai kota pada kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk. Namun pembangunan yang semakin meningkat berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan di pantai kota itu sendiri dan terhadap taraf hidup masyarakat sekitar sehingga terancam keberlanjutannya. Studi ini bertujuan menyusun arahan strategi pemanfaatan ruang di kawasan pantai Kota Cirebon dalam pembangunan berkelanjutan. Analisis yang dilakukan yaitu menganalisis kondisi eksisting kawasan pantai kota, kebijakan tata ruang, sosial dan ekonomi, dan menganalisis dengan dynamic SWOT untuk mendapatkan strategi pemanfaatan ruang. Hasil penelitian SWOT dalam pemanfaatan ruang kawasan pantai kota menunjukkan 4 arahan strategi kebijakan: pertama memberdayakan masyarakat pantai untuk mengembangkan pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang produktif, kedua mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi yang berada pada sepanjang pantai, ketiga meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya alam pantai kota dan menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman, keempat membuat peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan secara terpadu, serta penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku dengan mengacu RTRW.

**Kata Kunci :** Strategi, Pemanfaatan Ruang Kawasan, Pantai Kota

---

### PENDAHULUAN

Wilayah pantai merupakan wilayah yang penting akan tetapi rentan (*vulnerable*) terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pantai dipicu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata.

Pengertian pantai adalah bagian dari muka bumi dari muka air laut rata-rata terendah sampai muka air laut rata-rata tertinggi. Bird (1984) mendefinisikan pantai sebagai shore, beach dan coast. *Shore* adalah suatu daerah yang meluas dari titik terendah air laut pada saat surut hingga batas tertinggi atau efektif yang dapat dicapai gelombang, yaitu meliputi:

- a. pantai bagian depan (*foreshore*), yaitu daerah antara pasang tersurut sampai daerah pasang

- b. pantai bagian belakang (*backshore*), yaitu daerah antara pasang tertinggi sampai daerah tertinggi terkena ombak
- c. pantai lepas (*offshore*), yaitu daerah yang meluas dari titik pasang surut terendah ke arah laut *Beach* adalah daerah tempat akumulasi dari sedimen lepas seperti kerikil, pasir, dan lainnya yang kadang-kadang hanya sampai pada batas *backshore* tapi lebih sering sampai pada *foreshore*.

Sedangkan definisi kawasan Pantai Kota yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekologis sebagai berikut: Kawasan Pantai Kota adalah perkotaan yang terletak di wilayah pesisir yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, termasuk kawasan pengaruhnya yaitu daerah daratan, pantai dan laut. Susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, Kawasan ini terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa bagi komunitas perkotaan pantai dan pemanfaat lainnya, serta saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara bio-geofisik maupun sosial ekonomi (adaptasi UU No.24 Tahun 1992; Tjahjati, 2006 dan Akil, 2002).

Aktivitas manusia dalam memanfaatkannya dengan menciptakan ruang terbangun akhirnya sering mengakibatkan masalah di dalam ekosistem pantai kota. Pembatasan kawasan terbangun seperti pantai kota harus dilakukan. Perkembangan pemukiman, atau fasilitas lain harus dibatasi melalui sistem penataan ruang agar perkembangan ruang terbangun dapat terkendali dan arah pengembangan ke arah sepanjang pantai harus di cegah. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tinggi namun dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pantai kota ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat berkelanjutan.

Cirebon salah satu kota yang memiliki kawasan pantai yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan adanya pelabuhan sebagai sarana transportasi barang dan orang antar pulau untuk wilayah jawa barat. Kawasan pantai kota Cirebon adalah suatu daerah yang cepat mengalami pertumbuhan akibat adanya pembangunan fisik. Namun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan dikawasan tersebut sangat besar sisi negatifnya, terutama dari segi biofisik dan segi sosial ekonomi. Kesenjangan sosial, kemiskinan dan interaksi

yang tidak serasi, merupakan kenyataan yang ada akibat belum akrabnya perencanaan yang dihasilkan, dengan lingkungan hidup yang ada. Dilain pihak kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan, terjadi hampir seluruh kawasan ini, kemiskinanpun meningkat, data kemiskinan kecamatan Lemahwungkuk tahun 2006-2010: Jumlah keluarga 12,209 dengan keluarga miskin 4.581 prosentase 37,52. Dengan rincian perkelurahan Pengambiran 4,374 jumlah keluarga dengan 870 keluarga miskin, Kasepuhan 3,415 jumlah keluarga dengan 1,528 keluarga miskin, Lemahwungkuk 2,041 jumlah keluarga dengan 1,436 keluarga miskin, Panjunan 2,379 jumlah keluarga dengan 747 keluarga miskin, (BPS 2018 Kota Cirebon).

Permasalahan pemanfaatan ruang kawasan pantai kota di Kota Cirebon antara lain adanya pembangunan yang tidak memperhatikan sempadan pantai dan sungai, banyaknya bangunan liar sepanjang pantai dan sungai yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan, baik penataan maupun sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana yang belum memadai baik jenis maupun jumlah disebabkan meningkatnya pertambahan penduduk, pemanfaatan daerah pantai yang tidak sesuai dengan potensinya, serta kerusakan hutan mangrove sebagai pelindung alami pantai disebabkan pembabatan, alih fungsi lahan dan tumpahan minyak oleh kapal yang berakibat intrusi air laut, abrasi, erosi, sedimentasi, banjir rob, ancaman kenaikan muka air laut, ancaman gelombang badai, dan terjadinya pencemaran air laut akibat pembuangan limbah rumah tangga dan industri serta sampah. Disamping itu minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan daerah pantai kota dan lemahnya institusi dalam mengkoordinir kegiatan yang berada di pantai kota yang cenderung bergerak secara sektoral dengan koordinasi yang lemah mengakibatkan lemahnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fenomena pemanfaatan ruang kawasan pantai kota di Kota Cirebon dianalisis dengan pendekatan *Dynamic SWOT*, diantaranya analisis kondisi eksisting, analisis aspek kebijakan, analisis aspek sosial, dan analisis ekonomi. Data diperoleh melalui: data sekunder dari data instansional, sedangkan data primer diperoleh dengan metode observasi

lapangan, wawancara kepada Instansi terkait dan partisipan serta penyebaran kuesioner kepada penduduk di 8 kelurahan dengan total 100 responden dari dua kecamatan. Lokus penelitian yang terletak di kawasan pantai kota Cirebon terdiri dari dua kecamatan yakni Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk totalnya berjumlah 100.549 jiwa.

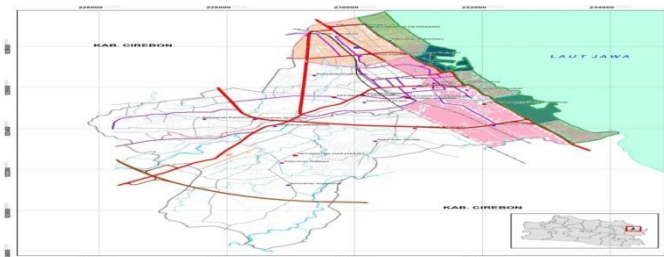
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ruang Lingkup Wilayah Studi

Dikaitkan dengan kondisi fisik pantai kota di Kota Cirebon maka, batasan wilayah studi kearah daratan dari garis pantai sampai pada batas wilayah kecamatan baik kecamatan Lemahwungkuk maupun kecamatan Kejaksan namun dititik beratkan pada batas jalan primer dari garis pantai ke daratan sepanjang pantai di kedua kecamatan dimana merupakan wilayah SWK 1. Alasan memakai batasan ruang lingkup tersebut karena pemanfaatan ruang terbangun pada daerah tersebut sangat mungkin terjadinya banyak permasalahan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan pantai kota.

Adapun kelurahan- kelurahan yang masuk dalam ruang lingkup penelitian, yaitu :

- Kecamatan Kejaksan dengan 4 kelurahan, yaitu: Kejaksan, Kesenden, Kebon Baru, Sukapura.
- Kecamatan Lemahwungkuk dengan 4 kelurahan, yaitu: Pajunan, Kasepuhan, Lemahwungkuk, Pengambiran.



Gambar 1. Tinjauan Umum Wilayah Pantai Kota Cirebon

### Letak geografis Kecamatan Kejaksan dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kab. Cirebon
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lemahwungkuk
- Sebelah Barat : Kecamatan Kesambi
- Ketinggian : 0-4m DPL / dari permukaan laut

Luas : 3,61 Km

Jumlah Penduduk : 44,722 jiwa

### Letak geografis Kecamatan Lemahwungkuk dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Kecamatan Kejaksan

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Cirebon

Sebelah Barat : Kec. Hajarmukti & Kec. Pekalipan

Ketinggian : 0-4m DPL / dari permukaan laut

Luas : 7,26 Km

Jumlah Penduduk : 55,827 jiwa

### Topografi

Makin landai pada jarak yang semakin dekat dengan garis pantai.

Karakteristik tanah pantainya sebagian besar berpasir campur lumpur

Kondisi bentuk pantai dan ombak relatif tidak terlalu besar.

### Hidrologi :

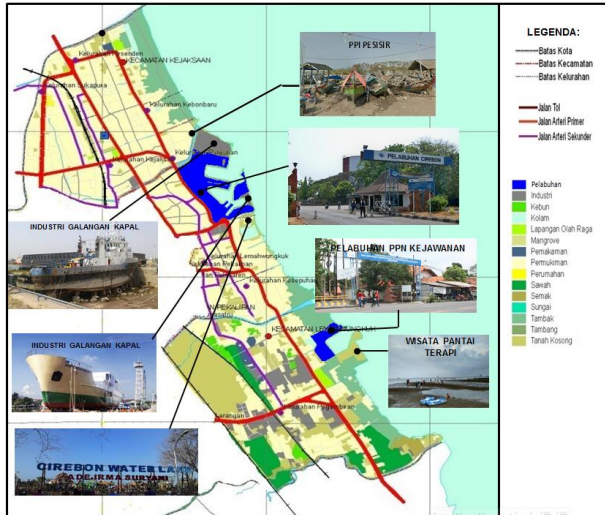
Air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut. sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang bersumber dari mata air wilayah Kabupaten Kuningan.

### Geologi :

Endapan aluvium (Qa). Fasies sedimen ini semakin ke arah pantai ditutupi oleh endapan pantai (Qac). Endapan pantai terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau, serta lempung kelabu yang mengandung cangkang moluska

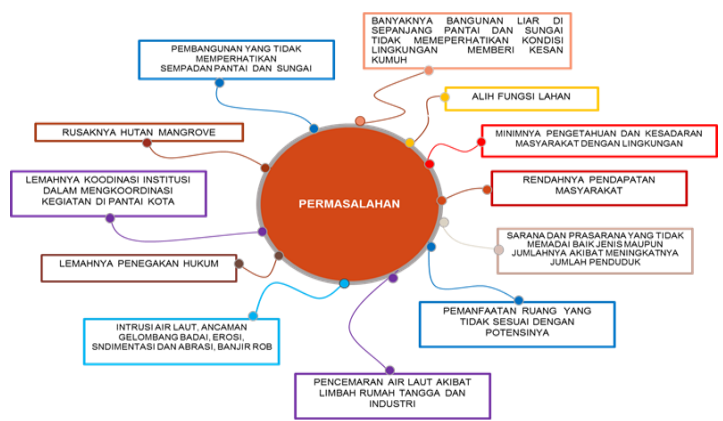
### Klimatologi :

Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan September mencapai 28,8 °C dan terendah pada bulan Agustus yaitu 22,9 °C, dimana curah hujan sangat bervariasi yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai ketinggian 705,8 mm selanjutnya pada bulan Maret 574,7 mm.



Gambar 2. Peta Pemanfaatan

### Permasalahan di Pantai Kota



Gambar 3. Analisis Penggunaan Lahan Kawasan Pantai Kota Cirebon

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin

Wilayah Pantai Kota Cirebon, Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	Keluarga Miskin
	Kejaksan	Kejaksan	899
		Kesenden	1.283
		Kebon Baru	1.155
		Sukapura	799
		<b>Jumlah</b>	<b>4.136</b>
	Lemahwungkuk *)	Lemahwungkuk *)	1.051
		Panjunan *)	1.286
		Kasepuhan *)	1.816
		Pegambiran *)	1.776
		<b>Jumlah</b>	<b>5.929</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Analisis kebijakan penggunaan lahan kawasan pantai kota di Kota Cirebon, maka pengendalian dapat dilakukan dengan tidak memberikan ijin membangun pada kawasan sempadan pantai dan sungai serta RTH. Sistem dan mekanisme perijinan juga harus disesuaikan dengan tata guna lahan pada kawasan pantai kota, berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pantai kota, persyaratan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), rekomendasi teknis dari instansi terkait dan terjaminnya akses publik. Ijin tidak akan diberikan apabila kegiatan pemanfaatan ruang terbangun dapat menimbulkan kerusakan atau dengan kata lain dapat mengancam kelestarian lingkungan kawasan pantai kota.

Diperlukan satu peraturan daerah dalam bentuk kebijakan pengelolaan wilayah pantai kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatannya yang diamanatkan didalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kota Cirebon telah memiliki rencana tata ruang dan wilayah, namun Kota Cirebon belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti apa yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2014.

Tabel 2. Analisis Kebijakan Penggunaan Lahan Kawasan Pantai Kota di Kota Cirebon

NO	RTRW Kota Cirebon	Kondisi Eksisting	Analisis Kebijakan
.	<p><b>Kawasan Lindung</b> (keppres No. 32 tahun 1990)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perlindungan Setempat yaitu sempadan pantai merupakan wilayah yang dibebaskan dari berbagai bentuk bangunan sejauh 100m dari kedudukan air pasang;</li> <li>• Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi/ infiltrasilaut.</li> <li>• Kegiatan yang berkaitan dengan kelautan seperti dermaga, pelabuhan/ kegiatan perikanan lain.</li> <li>• Kegiatan yang dikawatirkan mengganggu kelestarian fungsi lindung tidak diperbolehkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emanafaatan ruang terbangun pada kawasan sepadan pantai antara lain:</li> <li>• Pelabuhan Cirebon di Kelurahan Panjunan, Pelabuhan rakyat dan Pelabuhan Pendaratan Ikan Kejawan di Kelurahan Pengambiran Kec. Lemahwungkuk.</li> <li>• Pemukiman penduduk (Kelurahan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan).</li> <li>• Tambak hasil alih fungsi lahan bakau/mangrove</li> <li>• Kawasan hutan mangrove</li> <li>• Breakwater</li> </ul>	<p>Pemanfaatan ruang terbangun pada sempadan pantai sepanjang pantai kota di Kota Cirebon yang tidak sesuai yaitu pemukiman,. Hal ini merupakan suatu kondisi yang bertolak belakang dengan aturan yang ada.</p> <p><i>"Pada sempadan pantai, 100 m berlaku umum, beda dengan kondisi eksisting jadi kepres harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah."</i></p> <p>Untuk maksud itu diperlukan sejumlah alat kontrol berupa peraturan/regulasi yang menyangkut aktivitas disepanjang perkotaan pantai yang memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan serta konsep pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Untuk kedepannya, harus ditingkatkan pengendalian pengembangan serta pengaturan pengembangan fisik daerah pantai dengan mulai menerapkan "garis sempadan pantai" dalam usaha menormalisasikan daerah-daerah pantai yang sudah terbangun dan yang akan dikembangkan.</p>
.	<p><b>Kawasan Budaya Kawasan Perikanan</b> : Pelabuhan Pendaratan Ikan /PPI Kesenden (Kelurahan Kendsenden) dan PPI Pesisir (Kelurahan Panjunan), Pangkalan Pendaratan Ikan PPN Kejawan (Kelurahan Pengambiran).</p>	<p>Kawasan Perikanan sesuai dengan RTRW Kota Cirebon. (PPN kejawan masuk kawasan strategis)</p>	<p>Kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan lahan perikanan dinilai baik, karena potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan melalui pengembangan aktivitas perikanan.</p>
.	<p><b>Kawasan Pemukiman:</b> Pemukiman di kawasan perkotaan pantai pada Kelurahan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan).</p>	<p>Kondisi eksisting kawasan pemukiman di kawasan pantai kota sesuai dengan rencana tata ruang namun ada yang memanfaatkan jalur hijau sempadan pantai dan RTH antara lain Kelurahan Panjunan dan Lemahwungkuk.</p>	<p>Jika dikaitkan dengan Kepres No. 32 Tahun 1990 dengan kondisi eksisting maka hampir seluruh bangunan fisik tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan peran pemerintah yang lebih besar bagi masyarakat dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat yang pendapatannya rendah, baik menyangkut bangunan fisik maupun sarana-prasarana permukiman. Tanpa peranan pemerintah yang lebih besar dalam pengaturan daerah permukiman untuk mereka akan mengakibatkan perkembangan daerah permukiman tidak teratur, serta berdampak negatif terhadap lingkungan (Budihardjo, 1998: 149).</p>
.	<p><b>Kawasan Perdagangan dan Jasa</b> : Kegiatan perdagangan pada kawasan perkotaan pantai yaitu Kelurahan Kesenden, Panjunan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pengambiran</p>	<p>Kegiatan perdagangan pada tersebut sesuai dengan RTRW Kota Cirebon.</p>	<p>Kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan lahan perdagangan dan jasa dinilai baik, dapat dimanfaatkan melalui pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa.</p>
.	<p><b>Kawasan industri:</b> kawasan industri di kawasan perkotaan pantai yaitu kawasan industri berat (Kelurahan Panjunan).</p>	<p>Kawasan Industri berada di kelurahan Panjunan dan berdekatan dengan kawasan pelabuhan dan jalan .</p>	<p>Kebijakan pemerintah terhadap penggunaan lahan industri dinilai baik, karena industri berat umumnya menimbulkan gangguan lingkungan seperti timbulnya asap pembakaran, debu, atau suara bising, akan lebih tepat kalau ditempatkan agak jauh dari CBD maupun lingkungan pemukiman agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat (Sinulingga, 2005: 110).</p>

	<b>Kawasan Pergudangan:</b> Kawasan pergudangan (Kelurahan Panjunan) diarahkan ke tempat yang dekat dengan pelabuhan, jalan, kawasan industri dan perdagangan.	Kawasan pergudangan berdekatan dengan kawasan Pelabuhan dan Kawasan Industri.	Pergudangan menyangkut dengan distribusi dan transportasi dari pabrik ke gudang. Karena kegiatan tersebut sangat terkait dengan kegiatan transportasi, lokasi pergudangan harus dekat dengan jalanbebahambatanataupunjalanarteri (Sinulingga, 2005:111). Berdasarkan kriteria tersebut, kebijakan pemerintah terhadap penggunaan lahan pergudangan dinilai cukup baik. Karena lokasi kawasan pergudangan di kawasan pantai kota saat ini dekat dengan Pelabuhan
	<b>Kawasan Pelabuhan :</b> Kawasan Pelabuhan Cirebon berada di kelurahan Panjunan	Fasilitas Pelabuhan Cirebon sesuai dengan rencana RTRW Kota Cirebon. (kawasan strategis Kota Cirebon)	Kebijakan pemerintah terhadap penggunaan lahan pelabuhan dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan kawasan Pelabuhan Cirebon dengan perairan gelombang rendah. Untuk itu layak untuk dikembangkan.
	<b>Kawasan Wisata:</b> Kawasan Wisata terletak di pantai Kejawan Kelurahan Pengambiran dan Lemahwungkuk	Kawasan wisata sesuai dengan RTRW Kota Cirebon.	UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, disebutkan kawasan wisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun/disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata/menjadi sasaran wisata. Kebijakan terhadap penggunaan lahan pariwisata dinilai baik karena potensi wilayah perkotaan pantai dapat ditonjolkan melalui aktivitas pariwisata ini, dan layak untuk dikembangkan.

**Analisis Sosial Ekonomi di Kawasan Pantai Kota**

**Pendapatan Masyarakat Pantai Kota**

Rees dalam Yeates dan Garner (1980: 291) berpendapat bahwa Elemen yang mempengaruhi keputusan seseorang atau sebuah keluarga dalam menentukan pilihan lokasi tempat tinggal, yaitu: posisi keluarga dalam lingkup sosial, mencakup status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan); lingkup perumahan, mencakup: nilai, kualitas dan tipe rumah; lingkup komunitas; lingkup fisik atau lokasi rumah. Adanya pemukiman-pemukiman kumuh di kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan merupakan salah satu akibat dari pendapatan masyarakat pantai kota yang rendah, pendapatan masyarakat pantai kota dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Pendapatan Masyarakat Pantai Kota

Pendapatan	Persentase
< Rp. 500.000	29%
Rp. 500.000 – Rp. 1juta	47%
Rp. 1 juta –Rp. 1,5 juta	14%
Rp. 1,5 juta –Rp. 2 juta	4%
Rp. 2 juta –Rp. 3 juta	3%
> Rp. 3 juta	3%

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, maka permasalahan para nelayan kawasan pantai kota di Kota Cirebon dalam upaya meningkatkan produksi perikanan perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas armada

kapal, baik secara kelompok maupun individu; sehingga dapat mencapai area tangkap yang lebih jauh dan luas. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan pemberian kemudahan pendanaan (dengan perkreditan/koperasi) dan pengadaan barang (peralatan tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya). Serta memberikan alternatif tambahan pendapatan dengan usaha mandiri seperti industri pengolahan dan perdagangan yang berkaitan dengan input ikan. Meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan perkotaan pantai, akan berpengaruh terhadap kualitas pemukiman dan lingkungan kawasan pantai kota.

**Konsep Dasar Pemanfaatan Kawasan Pantai Kota**

Analisis dari permasalahan mengenai kondisi eksisting, aspek kebijakan, aspek sosial dan aspek ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi Eksisting :  
Diperlukan penataan yang sesuai dengan peraturan dan RTRW, Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak serta melengkapi sarana dan prasaran yang kurang atau dibutuhkan pada kawasan perkotaan pantai.
2. Aspek Kebijakan :  
Perlu adanya regulasi/peraturan yang jelas tidak tumpang tindih pada kawasan pantai kota di Kota Cirebon, Perlu adanya pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum pada pemanfaatan lahan

- di kawasan pantai kota.
3. Aspek Sosial :  
Pendapatan masyarakat pantai kota meningkat akan berpengaruh terhadap kualitas permukiman di lingkungan pantai kota.
  4. Aspek Ekonomi :  
Perlu pengembangan pemanfaatan potensi ekonomi pada kawasan pantai kota seperti (kawasan strategis) Pelabuhan Cirebon sebagai transportasi antar pulau dengan pergudangan dan Pelabuhan PPN Kejawan sebagai pelabuhan perikanan terpadu yang memiliki peran sebagai kawasan nelayan, perdagangan/pelelangan ikan serta wisata pantai terapi, sehingga dapat menyerap lapangan kerja khususnya untuk penduduk pantai kota dan dapat menambah pendapatan daerah.

Jika kondisi eksisting dan ketiga aspek diatas dapat diperbaiki dan terpenuhi maka dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan pantai kota secara terpadu (tidak tumpang tindih) dalam pemanfaatan ruang kawasan pantai kota agar optimal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan wilayah pantai kota di Kota Cirebon.

Sedangkan untuk pemanfaatan kawasan pantai kota di Kota Cirebon saat ini, diperlukan pengembangan (perbaikan fisik) untuk penanganan permasalahan kawasan pantai kota dengan cara antara lain: *renewal*, rehabilitasi, revitalisasi, dan reklamasi

Berdasarkan pengamatan kondisi dan potensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang prospektif yang belum dimanfaatkan secara optimal :

1. Potensi pantai sepanjang 7 km dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain: Pelabuhan Kota Cirebon, Pelabuhan PPN Kejawan, PPI Pesisir, tambak, Industri galangan kapal, Wisata Waterland Ade Irma Suryani, Wisata Pantai Terapi.
2. Tersedia sumber daya manusia yang beraktivitas dan mencari nafkah di kawasan pantai kota di Kota Cirebon antara lain: petani tambak, nelayan, buruh industri dan perdagangan serta jasa.
3. Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian antara lain: prasarana drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan. Keberadaan vegetasi mangrove sebagai Habitat Vital Biota,

Pengaman dan Penghijauan pantai/Tambak, Muara Sungai.

4. Peran serta masyarakat yang rendah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.
5. Sarana dan prasarana kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang telah tersedia belum memenuhi kebutuhan dari jenis dan jumlah yang disebabkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan tidak adanya upaya perawatan terhadap sarana dan prasarana.
6. Lemahnya penegakan hukum peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta tidak adanya peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan secara terpadu.
7. Belum ada institusi yang mampu (betul-betul diberi tugas) untuk mengkoordinir kegiatan yang berada di daerah pantai (wilayah pantai kota).

### **Analisis SWOT Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantai Kota**

Dalam analisis pemanfaatan Ruang Kawasan pantai kota di Kota Cirebon memerlukan identifikasi kemampuan kawasan pantai kota di Kota Cirebon dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan rencana strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman yang terjadi dan mengurangi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki kawasan pantai kota di Kota Cirebon. Analisis SWOT terhadap kawasan pantai kota ini dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini menampilkan identifikasi mengenai unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap keberlanjutan aktivitas pemanfaatan lahan kawasan pantai kota di Kota Cirebon, input-input dalam identifikasi unsur-unsur berdasarkan masukan dari instansi pemerintah dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan.

#### **a. Faktor Internal**

Identifikasi faktor strategi internal ialah suatu kondisi dari dalam yang mempengaruhi eksistensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon ini meliputi: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Berikut unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dari faktor internal kawasan pantai kota di Kota Cirebon.

#### 1. Unsur Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan pengamatan kondisi dan potensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang menjadi kekuatan sebagai berikut:

Potensi pantai sepanjang 7 km dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain:

- Pelabuhan Kota Cirebon, Pelabuhan PPN Kejawaan, PPI Pesisir, tambak, Industri galangan kapal, Wisata Waterland Ade Irma Suryani, Wisata Pantai Terapi.
- Tersedia sumber daya manusia yang beraktivitas dan mencari nafkah dikawasan pantai kota di Kota Cirebon antara lain: petani tambak, nelayan, buruh industri dan perdagangan serta jasa.
- Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian antara lain: prasarana drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan.
- Keberadaan vegetasi mangrove sebagai Habitat Vital Biot, Pengaman dan Penghijauan pantai/Tambak, Muara Sungai.

#### 2. Unsur Kelemahan (*Weakness*)

Potensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang prospektif yang belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan oleh adanya berbagai kekurangan/kelemahan sebagai berikut:

- Peran serta masyarakat yang rendah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.
- Sarana dan prasarana kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang telah tersedia belum memenuhi kebutuhan dari jenis dan jumlah yang disebabkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan tidak adanya upaya perawatan terhadap dan prasarana.
- Lemahnya penegakan hukum peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta tidak adanya peraturan daerah tentang

pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan secara terpadu.

- Belum ada institusi yang mampu (betul-betul diberi tugas) untuk mengkoordinir kegiatan yang berada didaerah pantai (wilayah pantai kota).

#### b. Faktor eksternal

Identifikasi faktor eksternal ialah suatu kondisi yang memberikan efek terhadap eksistensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon ini meliputi: peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treath*). Berikut ini penyajian unsur peluang dan ancaman dari faktor eksternal kawasan pantai kota di Kota Cirebon.

##### 1. Unsur Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kawasan pantai kota di Kota Cirebon.

- Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal membuka peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.
- Pengembangan Pelabuhan Cirebon dan PPN kejawaan serta Wisata Pantai Terapi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.
- Pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Cirebon yang semakin memperkuat pengelolaan sumberdaya dalam berdasarkan UU No,32 Tahun 2004.

##### 2. Unsur Ancaman (*Treath*)

Kawasan pantai kota di Kota Cirebon harus menghadapi ancaman dan dicarikan solusinya yaitu:

- Sedimentasi serta erosi, abrasi pantai dan perubahan musim yang sulit diprediksi yang mengancam keberlanjutan kegiatan masyarakat kawasan pantai kota di Kota Cirebon.
- Prilaku masyarakat di hulu dalam membuang limbah maupun sampah rumah tangga menuju kawasan pantai dan prilaku masyarakat di hilir yang kurang menyadari pentingnya kelestarian lingkungan di kawasan pantai kota.

Dalam analisis SWOT ini perlu dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur



SWOT. Berikut ini pembobotan/penilaian yang diberikan menggunakan skor antara 1-5. Arti dari skor ini adalah sebagai berikut:

Nilai 1 berarti tidak penting

Nilai 4 berarti penting

Nilai 2 berarti sedikit penting

Nilai 5 berarti sangat penting

Nilai 3 berarti cukup penting

Pembobotan faktor internal kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang dapat dilihat dalam Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Analisis Faktor Internal Kawasan Pantai Kota di Kota Cirebon

FAKTOR INTERNAL	SKOR	KETERANGAN
<b><u>Kekuatan</u></b>		
1. Potensi pantai sepanjang 7 km dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain: Pelabuhan Kota Cirebon, Pelabuhan PPN Kejawaan, PPI Pesisir, tambak, Industri galangan kapal, Wisata Waterland Ade Irma Suryani, Wisata Pantai Terapi.	5	Pertumbuhan kegiatan perikanan, industri, budidaya, perdagangan dan jasa sebagai core kegiatan perekonomian masyarakat.
2. Tersedia sumber daya manusia yang beraktivitas dan mencari nafkah di kawasan pantai kota di Kota Cirebon antara lain: petani tambak, nelayan, buruh industri dan perdagangan serta jasa.	5	Jumlah nelayan Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk : 500 orang, Selain itu juga penduduk berprofesi buruh, industri pengolahan ikan, petani tambak, pedagang.
3. Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian antara lain: prasarana drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan.	4	Prasarana jalan berfungsi untuk memudahkan akses dan mobilisasi, baik manusia maupun barang. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air buangan rumah tangga menuju ke laut atau terlebih dahulu melalui sungai walau saat ini sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta buangan sampah oleh penduduk sekitar kesungai diperlukan normalisasi. Sarana prasarana persampahan di areal lahan kosong, laut serta sungai karena minimnya TPS.
4. Keberadaan vegetasi mangrove sebagai Habitat Vital Biota, Pengaman dan Penghijauan Pantai/Tambak, Muara Sungai.	3	Vegetasi mangrove hampir secara keseluruhan mengalami kepunahan di kedua Kecamatan Kejaksan dan Lemahwungkuk. Diperlukan rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat.
<b><u>Kelemahan</u></b>		
1. Peran serta masyarakat yang rendah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.	5	Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan pantai kota di Kota Cirebon mayoritas tamatan SD
2. Sarana dan prasarana kawasan pantai kota Kota Cirebon yang telah tersedia belum memenuhi kebutuhan dari jenis dan jumlah yang disebabkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan tidak adanya upaya perawatan terhadap dan prasarana.	3	
3. Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta tidak adanya peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014	4	

<p>4. Belum ada institusi yang mampu (betul-betul diberi tugas) untuk mengkoordinir kegiatan yang berada didaerah pantai (wilayah pantai kota)</p>	<p>3</p>	<p>Sarana prasarana yang tersedia di kawasan pantai kota di Kota Cirebon adalah prasarana jalan, prasarana drainase. Namun perlu penambahan sarana prasarana persampahan (TPS), sarana IPAL, sarana prasarana sanitasi, dan sarana prasarana air bersih.</p> <p>Pemanfaatan daerah pantai yang tidak sesuai dengan potensi, permasalahan hukum, seperti belum adanya perangkat hukum yang memadai untuk pengelolaan daerah pantai, dan pemahaman hukum oleh masyarakat yang pada umumnya masih kurang, terutama terhadap penguasaan tanah-tanah timbul, masyarakat pada umumnya tidak memahami mengenai pengelolaan daerah pantai kota secara terpadu</p> <p>Berbagai instansi dan institusi yang ada masih bergerak secara sektoral dengan koordinasi yang relatif lemah.</p>
--	----------	--

Pembobotan faktor eksternal ialah suatu kondisi yang memberikan efek terhadap eksistensi kawasan pantai kota di Kota Cirebon, berupa: peluang (*opportunity*) dan hambatan (*treatth*). Berikut ini analisis faktor eksternal kawasan pantai kota di Kota Cirebon Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Faktor Eksternal Kawasan Pantai Kota di Kota Cirebon

FAKTOR EKSTERNAL	SKOR	KETERANGAN
<p><b><u>Peluang (Opportunities)</u></b></p> <p>1. Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal membuka peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.</p> <p>2. Pengembangan Pelabuhan Cirebon dan PPN kejawanan serta Pantai Terapi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.</p> <p>3. Pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Cirebon yang semakin memperkuat pengelolaan sumberdaya dalam berdasarkan UU No,32 Tahun 2004.</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>Ketersediaan sumber daya alam pantai kota, meliputi perikanan laut, perikanan darat dan pariwisata menjadi daya tarik aktivitas yang produktif untuk mendatangkan investor yang menanamkan modal bagi pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan lokal (Kota Cirebon dan sekitarnya) dan regional (Jakarta, Bandung, dan Kuningan) terhadap hasil-hasil perikanan dari kawasan pantai kota di Kota Cirebon.</p> <p>Potensi ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar yaitu Pelabuhan dan PPN Kejawanan dengan wisata pantai terapinya yang merupakan kawasan strategis dan dapat menambah PAD Kota Cirebon.</p> <p>Memperbesar peluang daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daya alam wilayah pantai kota dan laut secara mandiri sampai 4 mil dari garis pantai untuk kesejahteraan masyarakat kawasan pantai kota.</p>

<p><b><u>Ancaman (Treath)</u></b></p> <p>1. Sedimentasi serta erosi, abrasi pantai dan perubahan musim yang sulit diprediksi yang mengancam keberlanjutan kegiatan masyarakat di kawasan pantai kota Kota Cirebon.</p>	<p>5</p>	<p>Sedimentasi rentan mengancam pantai terutama yang berdekatan dengan sungai yang diakibatkan karena erosi dan buangan sampah masyarakat sekitar serta berkurangnya mangrove. Untuk abrasi terutama pada pelabuhan kelurahan panjunan, lemahwungkuk, kasepuhan, Pegambiran terbebas dari abrasi karena <i>breakwater</i> walau masih dirasakan kurang.</p>
<p>2. Prilaku masyarakat di hulu dalam membuang limbah maupun sampah rumah tangga menuju kawasan pantai dan prilaku masyarakat di hilir yang kurang menyadari pentingnya kelestarian lingkungan di kawasan pantai kota.</p>	<p>4</p>	<p>Kawasan pantai kota merupakan kawasan hilir yang rentan terhadap aktivitas masyarakat didaerah hilir yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan lautan sehingga mempercepat pendangkalan pada sungai dan lautan.</p>

Setelah memberikan pembobotan terhadap unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan analisis faktor internal dan eksternal kemampuan kawasan pantai kota di Kota Cirebon. Langkah selanjutnya adalah menyusun matriks SWOT

yang menggabungkan antara analisis internal dengan analisis eksternal sehingga terbentuk alternatif-alternatif rencana strategi kawasan pantai kota di Kota Cirebon. Penyusunan matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks SWOT Kawasan Pantai Kota (Kota Cirebon)

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b><u>KEKUATAN (Strength)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi pantai sepanjang 7 km dengan berbagai pemanfaatan ruang antara lain: Pelabuhan Kota Cirebon, Pelabuhan PPN Kejawaan, PPI Pesisir, Industri galangan kapal, Wisata Waterland ade Irma suryani, Wisata Pantai Terapi..</li> <li>Tersedia sumber daya manusia yang beraktivitas dan mencari nafkah dikawasan pantai kota Kota Cirebon antara lain: petani tambak, nelayan, buruh industri dan perdagangan serta jasa.</li> <li>Tersedia sarana dan prasarana permukiman dalam pengembangan hunian antara lain: prasarana drainase, prasarana jalan dan prasarana persampahan.</li> <li>Keberadaan vegetasi mangrove sebagai Habitat Vital Biota, Pengaman dan Penghijauan Pantai/Tambak, Muara Sungai.</li> </ol>	<p><b><u>KELEMAHAN (Weakness)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan ruang sesuai RTRW serta tidak adanya peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014.</li> <li>Sarana dan prasarana kawasan pantai kota di Kota Cirebon yang telah tersedia belum memenuhi kebutuhan dari jenis dan jumlah yang disebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan tidak adanya upaya perawatan terhadap sarana dan prasarana.</li> <li>Peran serta masyarakat yang rendah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disebabkan keterbatasan mengenyam pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.</li> <li>Belum ada institusi yang mampu (betul-betul diberi tugas) untuk mengkoordinir kegiatan yang berada didaerah pantai (wilayah pantai kota)</li> </ol>
	<p><b><u>PELUANG (Opportunities)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal membuka peluang berkembangnya aktivitas pantai kota.</li> <li>Pelimpahan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Cirebon yang semakin memperkuat pengelolaan sumberdaya dalam berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.</li> <li>Pengembangan Pelabuhan Kota Cirebon PPN kejawaan , industri galangan kapal, Wisata Pantai Terapi,yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar.</li> </ol>	<p><b><u>KEKUATAN - PELUANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang produktif.</li> <li>Memberdayakan masyarakat pantai dengan dibekali ketrampilan untuk mengolah sumber daya alam.</li> <li>Mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi yang berada pada sepanjang pantai hingga mampu menyerap lapangan kerja bagi masyarakat pantai kota seperti: Pelabuhan Cirebon, PPN kejawaan, industri galangan kapal, wisata waterland ade Irma suryani dan wisata pantai terapi.</li> </ul> <p><b><u>KEKUATAN – ANCAMAN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sabuk hijau dengan</li> </ul>

<p><b>ANCAMAN (Threat)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sedimentasi serta erosi, abrasi pantai dan perubahan musim yang sulit diprediksi yang mengancam keberlanjutan kegiatan masyarakat di kawasan pantai kota di Kota Cirebon.</li> <li>2. Prilaku masyarakat di hulu dalam membuang limbah maupun sampah rumah tangga menuju kawasan pantai dan prilaku masyarakat di hilir yang kurang menyadari pentingnya kelestarian lingkungan di kawasan pantai kota.</li> </ol>	<p>penanaman mangrove di sekitar muara sungai dan sempadan pantai yang diperkuat adanya groin sebagai pengendali teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pengendalian yang terintegrasi antar instansi dan antar sektoral di hulu dan di hilir untuk melindungi keberlanjutan kehidupan di kawasan pantai kota.</li> <li>• Menata sarana prasarana permukiman untuk menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman.</li> </ul>	<p>ditentukan di dalam RTRW pantai dari aktivitas manusia maupun pembangunan permanen untuk meminimalkan ancaman abrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan kampanye pendidikan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang di kawasan pantai kota di Kota Cirebon.</li> </ul>
---	---	--

Pembentukan 4 strategi hasil matriks SWOT menciptakan 10 alternatif strategi yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan kawasan pantai kota di Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang produktif. (Kekuatan – Peluang)
2. Memberdayakan masyarakat pantai dengan dibekali ketrampilan untuk mengolah sumber daya alam. (Kekuatan – Peluang)
3. Mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi yang berada pada sepanjang pantai hingga mampu menyerap lapangan kerja bagi masyarakat pantai kota seperti: Pelabuhan Cirebon, industri galangan kapal, PPN kejawanan, wisata waterland ade Irma suryani dan wisata pantai terapi. (Kekuatan – Peluang)
4. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan secara terpadu, serta penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku dengan mengacu RTRW. (Kelemahan – Peluang)
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung pengelolaan sumber daya alam pantai kota. (Kelemahan – Peluang)
6. Pembangunan sabuk hijau dengan penanaman dan rehabilitasi mangrove di sekitar muara sungai dan sempadan pantai yang diperkuat adanya groin sebagai pengendali teknis. (Kekuatan – Ancaman)
7. Koordinasi dan pengendalian yang terintegrasi antar instansi dan antar sektoral di hulu dan di hilir untuk melindungi keberlanjutan kehidupan di

kawasan pantai kota. (Kekuatan – Ancaman)

8. Menata sarana prasarana permukiman untuk menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman. (Kekuatan – Ancaman)
9. Melindungi sempadan pantai yang telah ditentukan di dalam RTRW pantai dari aktivitas manusia maupun pembangunan permanen untuk meminimalkan ancaman abrasi. (Kelemahan – Ancaman)
10. Sosialisasi dan kampanye pendidikan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang di kawasan pantai kota di Kota Cirebon. (Kelemahan – Ancaman)

Kesepuluh strategi tersebut dapat difokuskan untuk menjadikan rencana strategi pemanfaatan ruang kawasan pantai kota di Kota Cirebon dalam pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat pantai untuk mengembangkan pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang produktif.

Strategi ini memberikan kondisi nyata bahwa unsur kekuatan dan peluang pemanfaatan ruang sumber daya dapat ditingkatkan dengan mengalokasikan pemanfaatan ruang sesuai potensi sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Potensi sumber daya manusia adalah nelayan, petani tambak, buruh industri pengolahan ikan dan pelaku perdagangan dan jasa. Pemanfaatan ruang selain diperlukan untuk mempertinggi kesempatan ekonomi yang dimiliki, ruang juga diarahkan untuk tidak mengeksploitasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh ruang secara berlebihan sehingga terjadi proses berkelanjutan.

Sumber daya alam yang ada antara lain: perikanan laut, perikanan darat, pariwisata dan vegetasi mangrove.

2. Mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi yang berada pada sepanjang pantai.

Strategi ini guna memberdayakan dan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat pantai kota agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya alam pantai kota dan menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman.

Strategi ini menunjukkan perlunya pengembangan guna perbaikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kondisi eksisting saat ini, sesuai karakteristik pantai dengan cara antara lain *renewal*, rehabilitasi, revitalisasi, dan reklamasi. Pengembangan adalah sebagai berikut:

- (a) Pantai landai (dataran dan dataran berpasir) : Kawasan permukiman dengan penataan/*renewal*, kawasan industri, kawasan wisata pantai waterland ade Irma suryani (Kelurahan Lemahwungkuk), wisata pantai terapi (Kelurahan pegambiran), Perdagangan (Kelurahan Kesenden, Kebon Baru, Panjunan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran) dikembangkan dengan cara revitalisasi .
- (b) Pantai Endapan lumpur: Kawasan Mangrove tepi pantai (Kelurahan Kesenden, Kebon Baru, Kasepuhan, Pegambiran) dengan cara rehabilitasi mangrove untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada, abrasi dan erosi pantai, menjaga kestabilan hidrologi(fungsi hidrologis), menambah ketersediaan air, mengurangi banjir..
- (c) Pantai Reklamasi : Pelabuhan Cirebon (Kelurahan Panjunan), PPN Kejawan (Kelurahan Pegambiran). . Berdasarkan kondisi dilapangan, jenis sarana dan prasarana yang sangat mendesak untuk disediakan adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara, perbaikan rumah yang kurang layak,

penyediaan dan pemerataan sarana sanitasi,

4. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelola secara terpadu, serta penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku dengan mengacu RTRW.

Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pantai kota berbasis zonasi akan lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pantai kota secara terpadu. sehingga tidak terjadi tumpang tindih (pemanfaatan sesuai potensi) dan meminimalisir pelanggaran dalam pemanfaatan ruang kawasan pantai kota.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan didapatkan 4 arahan strategi pemanfaatan ruang kawasan pantai kota di Kota Cirebon dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Memberdayakan masyarakat pantai untuk mengembangkan pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang produktif,
2. Mengembangkan pemanfaatan sektor ekonomi yang berada pada sepanjang pantai,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya alam pantai kota dan menciptakan lingkungan hunian yang bersih, sehat dan nyaman,
4. Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pantai kota berbasis zonasi seperti amanat UU No.1 Tahun 2014 dengan pengelolaan secara terpadu, serta penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku dengan mengacu RTRW.

### Saran

1. Menetapkan RTRW Pantai dengan Peraturan Daerah agar secara hukum dapat menegakan aturan tegas dan adil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan aktivitas pantai kota, dan mengantisipasi terjadinya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali, serta meminimalkan kemungkinan timbul konflik

- kepentingan dan degradasi lingkungan di masa sekarang dan mendatang.
2. Sosialisasi dan pembinaan atau kampanye pendidikan mengenai kebijakan RTRW Pantai melalui forum komunikasi masyarakat sebagai wadah bertukar informasi dan koordinasi antar masyarakat kawasan pantai Kota Cirebon.
  3. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dan sektor di hulu dan hilir untuk menjaga lingkungan hulu-hilir dengan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran agar kelestarian lingkungan di Kawasan Pantai Kota Cirebon dapat terjaga.
  4. Meningkatkan perlindungan terhadap sempadan pantai dengan menempatkan groin dengan tumpukan batu dan mangrove, serta penghijauan dengan cemara laut, pohon waru dan tanaman lain yang cocok dengan lahan setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. 2010. *Strategi Pengembangan Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Laut Gili Sulat: Satu Pendekatan Stakeholder*. Jurnal. Bumi Lestari Vol 10 No. 2 ISSN: 256-262.
- Asti, A.F. 2009. *Pendekatan Ekosistem Terpadu: Strategi dalam Pengelolaan Laut dan Pesisir*. Jurnal. Wacana Indonesia Vol 1, No. 1. ISSN: 1858-0358.
- Badan Pusat Statistik 2018 Kecamatan Dalam Angka Kejaksaan dan Lemah wungkuk 2017 BPS Kota Cirebon, Cirebon
- Bappeda Kota Cirebon, 2011-2031, RUTR Wilayah Kota Cirebon. Bappeda. Cirebon
- Budiharjo, Eko. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Penerbit Andi offset.
- Dahuri, R., Jacub, R., Sapta P., dan M.J, Sitepu. 2010. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin dan Iwan Nugroho. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES.
- Dahuri, et al. 2001. *Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : Pt Pradnya Paramita.
- Dinas Kelautan, Perikanan, Perternakan, dan, Pertanian Kota Cirebon. 2017
- Djunaedi.,A, dan Basuki.,M. 2002. *Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir*. Jurnal. Teknologi Lingkungan Vol 3, No. 3.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031  
Laporan Tahunan (tahun 2015, 2016, 2017)  
Kelurahan Kasepuhan, Kebon Baru, Kejaksan, Kesenden, Lemahwungkuk, Panjunan, Pegambiran, Sukapura.
- Rais, Jacub. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Penerbit PT Pradnya Paramita.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suprijanto, Iwan. *Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global*. Proceeding Karakteristik Spesifik, Permasalahan Dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (Coastal City) Di Indonesia. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.
- Profil Kota Cirebon, 2016, Kerjasama Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
- Yeates, Maurice dan Barry Garner. 1980. *The North American City*. Harper & Row, Publisher New York
- Zamdial, Dede Hartono, Dedy Bakhtiar, Eko Nofridiansyah, *Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*, EISSN: 2527-5186, Jurnal Enggano Vol. 2, No. 2, September 2017: 196-207